

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Biasanya dilakukan analisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti.

Sugiyono (2005 : 21), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Dengan alamat Jl. Raya Mayjen DI Panjaitan No. 17, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur. Peneliti memilih objek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun karena ingin tahu seberapa jauh pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem pengeluaran

kas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa deskripsi pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2016: 15), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakuakn secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

### 3.4 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sugiyono (2016 : 308-309), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti baik

pribadi maupun dari organisasi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian. Peneliti memilih menggunakan data primer karena dalam penelitian ini penulis mendapatkan data secara langsung untuk mengetahui gambaran pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun melalui tanya jawab dengan pihak terkait dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan.

## 2. Data Sekunder

Sugiyono (2016 : 308-309), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dalam buku-buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Madiun. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun mengenai pengendalian internal, dan sistem pengeluaran kas.

## 2. Wawancara

Hartanto (2017), metode wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Dijelaskan pulabahwa wawancaradapat berupa wawancara personal (personal-interview), wawancara intercept (intercept interview), serta wawancara telepon (telephone interview). Penelitian ini menggunakan wawancara personal (personal interview) yaitu wawancara dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yaitu dengan Kasubag Umum dan Keuangan, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, dan dengan Admin Bagian Sekretariat. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, pengendalian internal, dan sistem pengeluaran kas.

## 3. Dokumentasi

Hikmat (2021), dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang bersifat dokumen

ini terutama lebih difokuskan pada masalah penelitian, di antaranya, mengenai sejarah kelembagaan, daerah penyebaran, kewilayahan, kependudukan, agama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran struktur organisasi, laporan terkait capaian kinerja dan keuangan, laporan terkait pengendalian internal sistem pengeluaran kas.

### **3.6 Metode Analisis**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2021 : 21) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah suatu rangkaian tindakan untuk menganalisis, mengumpulkan, mengelola, menyusun, dan menganalisis data, serta membandingkan data-data yang diperoleh yang berhubungan dengan pengeluaran kas yang dilakukan pada instansi, dengan landasan teori yang ada kemudian diadakan pembahasan masalah supaya kita dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan sehingga dapat mengambil kesimpulan pada data tersebut.

### **3.7 Definisi Operasional Variabel**

Komponen-komponen yang termasuk dalam pengendalian internal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

## 1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam system pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Sebaik apapun system pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan merusak system yang dibangun. Sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan. Karena organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang yang baik akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang

efektif

- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah

## **2. Penilaian Risiko.**

Penilaian resiko merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko relevan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, dan menjadi dasar untuk memutuskan bagaimana risiko harus dikelola. Setiap instansi menghadapi beragam risiko baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam instansi.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan:
2. Analisis risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi Pemerintah menetapkan:

## **3. Kegiatan pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi risiko telah

dilaksanakan secara efektif. Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

#### **4. Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen system pengendalian internal lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan



tanggungjawab pengendalian secara baik, informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam suatu organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan, atau antara karyawan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

Instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

## **5. Pemantauan pengendalian internal**

Pemantauan pengendalian internal pada dasarnya adalah memastikan bahwa system pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan

perkembangannya. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan Tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

